

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024

05 September 2024 Jam 15:44:23 | adminjdih | 21

TENTANG Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Keyword :

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Bapak/bu/saudara dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah in melalui email hukum@bantulkab.go.id.

DOWNLOAD LAMPIRAN

Download 284 Kb | [rancangan-peraturan-daerah-tahun-2024.pdf](#) (13)



Jenis Rancangan

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Bupati

Pencegahan dan Penanggulangan Pe

Rancangan Produk Hukum Terbaru

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024

05 September 2024 Jam 15:44:23
Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023

04 Oktober 2023 Jam 14:57:46
Tentang Pencabutan Perda No 10 Th 2009 , No 3 Th 2012 , No 4 Th 2012, Dan No 4 th201

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023

04 Oktober 2023 Jam 14:19:46
Tentang Peraturan Daerah Tentang Pajak

BAGIAN HUKUM SETDA.
KABUPATEN BANTUL

=====

NOTULEN

Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
Acara : Koordinasi Identifikasi Regulasi Pengaturan Kalurahan

Hadir :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
2. Ketua Paguyuban Panewu;
3. Ketua Paguyuban Lurah;
4. Ketua APDESI;
5. Ketua PAPDESEI;
6. Ketua dan unsur Bamuskal;
7. DPMK;
8. Inspektorat Daerah;
9. Bagian Tata Pemerintahan;
10. Bagian Hukum.

Kesimpulan :

1. Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum.
2. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menampung masukan dari peserta rapat terkait regulasi apa yang mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
3. Beberapa masukan yang dihimpun sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli Bupati :
 - Pengaturan di Tingkat kalurahan memang perlu untuk dikaji walaupun secara pengaturan kalurahan, Kabupaten Bantul terbilang cukup lengkap pengaturannya, namun demikian masih ada beberapa yang masih melandaskan pada Permendagri dalam operasionalnya.
 - Usulan perlu adanya pengaturan terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kalurahan, sehingga dapat jelas sejauh mana kewenangan Panewu, Bagian Tata Pemerintahan,

dan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas fungsinya.

- Adanya reiew terkait dengan ketugasan RT yang dirasakan tidak sebanding dengan penghargaan dari Kalurahan

b. Panewu Pandak :

- Perlunya pengaturan mutasi dan rotasi pamong
- Pengaturan yang jelas terkait sejauh mana subyektivitas Lurah dalam menentukan pamong;
- Sepakat dengan Pak Toro berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kalurahan

c. Kepala Bagian Hukum :

- Pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sudah ada di ketentuan Pasal 154 PP 47 Tahun 2015 sebanyak 18 item, namun menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menjabarkan 18 item sehingga ada batasan yang jelas
- Rancangan peraturan bupati yang mengatur mutase dan rotasi pamong merupakan tindak lanjut dari Perda7 Tahun 2023.

d. Ketua Paguyuban Lurah :

- Sepakat dengan pengaturan mutase dan rotasi pamong dan ditambah materi terkait dengan kesempatan bagi staf kalurahan yang SDM lebih unggul untuk mengisi lowongan pamong.

e. Bamuskal Karangtengah :

- Perlu diberikan bimtek bagi anggota Bamuskal yang baru agar memahami tugas dan fungsi sebagai anggota Bamuskal
- Perlu ditinjau kembali Perda yang mengatur Bamuskal

f. Inspektorat Daerah :

- Sepakat dibuat regulasi yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, karena ada ketugasan APIP sehingga jelas

g. DPMK :

- Perlu pengaturan tentang administrasi kalurahan sebagai tindak lanjut temuan inspektorat diy
- Perlu juga pengaturan protokoler bagi pamong yang meninggal
- Perubahan sikluas tahunan desa
- Perubahan pengaturan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah kalurahan.

4. Kesimpulan :

Regulasi yang menjadi prioritas penyusunan tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- b. Evaluasi perda bamuskal;
- c. Perkada sebagai tindak lanjut Perda 7 Tahun 2023;
- d. Perkada tentang administrasi kalurahan;
- e. Perkada protokoler pamong kalurahan;
- f. Perkada perkawinan dan perceraian pamong;
- g. Perubahan siklus tahunan desa; dan
- h. Perubahan pengadaan barang dan jasa di kalurahan.

Notulen



Atim Nastiari